

**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA  
KEUANGAN  
(Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (ES)

Oleh:

**AMIN HIDAYAT  
NIM 1223205012**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Hidayat  
NIM : 1223205012  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Juli 2017

Yang menyatakan,



**Amin Hidayat**  
NIM. 1223205012

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

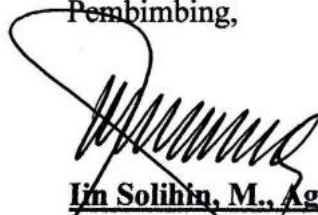
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Amin Hidayat, NIM. 1223205012 yang berjudul :

**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT  
TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi (S.E.)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, Juli 2017  
Pembimbing,



**Iin Solihin, M. Ag**  
NIP. 197208052001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN  
LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA  
KEUANGAN (Studi Kasus di Kantor OJK Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara **Amin Hidayat** NIM. 1223205012  
Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Dewan  
Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang/Penguji

  
Drs. Atabk, M. Ag.  
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Rahmini Hadi, SE., M.Si.  
NIP. 197012242005012001

Pembimbing/Penguji

  
In Solikhin,  
NIP. 197208052001121002

Purwokerto Agustus 2017  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan,

  
Dr. H. Pathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 196804031994031004

**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN  
(Studi di Kantor OJK Purwokerto)**

**Amin Hidayat**  
NIM. 1223205012

E-mail: [aminhidayat039@gmail.com](mailto:aminhidayat039@gmail.com)  
Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya pemahaman terhadap keuangan, menurut buku pedoman strategi nasional literasi keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Sosialisasi mengenai literasi keuangan di Indonesia dilakukan oleh OJK sebagai sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang well literate, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: *pertama*, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, *kedua*, penguatan infrastruktur literasi keuangan, *ketiga*, pengembangan produk dan jasa keuangan.

**Kata Kunci :** Peran OJK, Literasi Keuangan, Keuangan Inklusif

**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN  
(Studi di Kantor OJK Purwokerto)**

**Amin Hidayat**  
NIM. 1223205012

E-mail: [aminhidayat039@gmail.com](mailto:aminhidayat039@gmail.com)  
Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Financial Literacy that have meaning is to understand about financial, according to the book guide strategy national financial literacy of Indonesia, that mind with financial literacy is a process or activity to up knowledge, confidence, and skill consumer and wide people so that them capable of manage money that better. Financial literacy can not to come to society if nothing a remedy that to do by government or organization in the socialization about financial literacy. Socialization about financial literacy in indonesia to do by OJK Purwokerto. Financial servis authority as like a organization guide industries financial servis in Indonesia.

This sort research is field research, a research that to do in the location with to watch closely something about phenomom in the a natural situation, data founded from interview research as like OJK Office, in the get data with observation, interview, and the documentasion. This research use analysis descriptive with improve qualitative location research to do in the office OJK Purwokerto.

The point show that OJK in the up financial literacy to society to wards that good, that is see from to do programme national strategy financial literacy that to do by OJK with use 3 pillar, where 3 pillar that include from basic sketch to make society that well literate. As regards 3 pillar is the first, education and national campagain financial literacy, the second, infacstructure financial literacy, the three is varietas product and financial servis.

**Key Word** :OJK, Financial Literacy, Financial Inclusive

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. Sang revolusioner Umat Islam.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
4. Iin Solihin, M.Ag, sebagai pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Segenap Dosen dan staf administrasi IAIN Purwokerto.
6. Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kepada kepala kantor OJK beserta karyawan yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

7. Orang tua tercinta Bapak Warsad (alm) dan Ibu Suwaryanti yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tulus, kasih sayang dan cinta yang melimpah, dorongan serta perhatian yang sangat mendalam.
5. Kepada Ibu Muettia KD terima kasih atas arahan dan supportnya.
6. Kepada Kakak-kakakku tercinta Dwi Tuti W, Tri Suhestriningsih, Imam Santosa, dan juga adiku Anjar Satria P, terima kasih atas support dan Doanya sehingga penyusun tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seperjuangan: Nur Soleh, Idris Fitrianto, Luthfi Ahmad S, Alfau Fauzi, Sufangat Anggun A, Faricha Rizkiy H, Harti Satriyani, Nur Istiqomah, Masyrifatul A, Rachmi Emilia S, Rohman Hidayat.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
9. Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan Penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam.

skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiinyarobbal 'alamiin.*

Purwokerto, Juli 2017  
Penulis,



**Amin Hidayat**  
NIM. 1223205012



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	Fathāh	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Ḍammah	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikutihuruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawā'īl-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Literasi Keuangan.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Dasar Literasi Keuangan .....	23

3. Indikator Literasi Keuangan .....	24
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan .....	26
5. Strategi Literasi Keuangan oleh OJK .....	26
6. Tujuan Literasi Keuangan .....	29
B. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) .....	30
1. Gambaran Umum OJK .....	30
2. Visi dan Misi OJK .....	31
C. Strategi Literasi Keuangan .....	34
1. Indikator Literasi Keuangan .....	34
2. 3 Pilar Strategi Literasi Keuangan .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Jenis Data .....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	43

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum OJK Purwokerto .....	45
1. Sejarah Berdirinya OJK Purwokerto .....	45
2. Profil OJK Purwokerto .....	46
3. Landasan Hukum OJK Purwokerto .....	47

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu .....	16
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi OJK Purwokerto .....	50
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IJK	: Industri Jasa Keuangan
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
BI	: Bank Indonesia
GDP	: Gross Domestic Product
UU	: Undang-undang
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
TPAKD	: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
FKJK	: Forum Komunikasi Jasa Keuangan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan survei kedua yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2016, menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%.<sup>1</sup> Menurut data Bank Dunia (*world bank*), Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan. Karena itu, kebutuhan pengembangan keuangan mikro dan program keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang lebih efektif dan efisien.

Praktik ekonomi yang *ekklusif* menjadi belenggu kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan terobosan untuk menghasilkan kehidupan ekonomi yang *inklusif*. Sistem layanan keuangan yang *inklusif* sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi kalangan berada namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin.

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 15 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB).

Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan tersebut. pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas.<sup>2</sup>

Adapun definisi yang lebih operasional ditawarkan oleh *House of Commons Treasury Committee* yang menyebut bahwa *financial inclusion* merupakan kemampuan perorangan dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan ini utamanya berkaitan dengan satu kompleks pemahaman yang meliputi *financial awareness*, pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan dan pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan serta permohonan atas berbagai keuntungan memanfaatkan saluran perbankan pemahaman tersebut masuk dalam indikator masyarakat yang telah *well literate* dalam bentuk literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan inklusi keuangan, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, potensi menjadi korban transaksi keuangan juga akan semakin besar.

Dalam hal ini keuangan inklusif merupakan salah satu instrumen yang menunjang literasi keuangan yang mana OJK bersama IJK sendiri pada tahun 2013 telah menyusun strategi nasional literasi keuangan dan strategi nasional keuangan inklusif.

---

<sup>2</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan.*, (Jakarta:Gramedia, 2014), hlm 51.

Menurut Lusardi dalam penelitian Krisna literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Houston dalam penelitian Widyawati menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>4</sup> Remund dalam penelitian Widyawati menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi<sup>5</sup>. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi juga atribut nonkognitif.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang

---

<sup>3</sup> Krishna, Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (*Proceeding of The 4th International Confrence on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung*, Indonesia, 8-10 November 2010)., hal 552-560.

<sup>4</sup> Widayati, Irin. 2010 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1 (1): 89-99.

<sup>5</sup> *Ibid.*

industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.<sup>6</sup>

Literasi memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu, *pertama* meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*, *kedua* meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, mengenai produk lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat menentukan kebutuhan keuangan yang baik dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu, *well literate*, *sufficient literate*, *less literate*, *not literate*.<sup>7</sup>

OJK sebagai sebuah regulator keuangan meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar

---

<sup>6</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 26 Maret 2017, Pukul 20:43.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 15 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB).

upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.<sup>8</sup>

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itulah berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan layanan keuangan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tak kalah penting edukasi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sejauh ini jarang bersentuhan dengan lembaga jasa keuangan (LJK), seperti kelompok petani, nelayan, pedagang atau lainnya. Tingkat literasi kelompok masyarakat tersebut tidak begitu bagus. Pemanfaatan jasa keuangan oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga tidak banyak.<sup>9</sup>

Literasi keuangan harus dapat mengedukasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Literasi Keuangan OJK*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 3.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 15 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB).

masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

OJK sangat intensif menstimulus masyarakat untuk mengenal dan mengerti produk-produk jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangatlah dibutuhkan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan produk/ jasa keuangan. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan melalui produk dan layanannya harus menjadi mitra bagi masyarakat dan dapat menyediakan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Itu yang akan menjadikan industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan. Dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila di dukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan *usage/manfaat* yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Brigit Helms, *Access for All: Building Inclusive Financial System* (Washington, D.C.: The World Bank, 2006), hlm. 2.

Dari dua hal itu, pada 18 Desember 2014 lalu OJK bersama lembaga jasa keuangan (LJK) dan pemerintah meluncurkan salah satu program yakni Layanan Keuangan Mikro.<sup>11</sup>

Layanan Keuangan Mikro adalah layanan terpadu yang memiliki proses sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi, investasi dan pinjaman. Oleh karena itu, OJK bersama lembaga jasa keuangan (LJK) berusaha mendekatkan masyarakat salah satunya dengan melalui Layanan Keuangan Mikro. Program ini juga termasuk sebagai salah satu strategi literasi keuangan yang disusun oleh OJK dan lembaga jasa keuangan.

Dengan hasil survei tersebut OJK bersama IJK menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang di dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.<sup>12</sup> Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) Purwokerto kaitannya dengan meningkatkan literasi keuangan. Untuk itu, penulis mengambil judul “PERAN OJK ( OTORITAS JASA KEUANGAN ) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN”.

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *Ibid,*

## **B. Definisi Oprasional**

### 1. OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang di jalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.<sup>13</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Ed Revisi 2014,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 323.

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 15 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB).



## 2. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat (1995:1) adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*) misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset riil misalnya: gedung, peralatan, dan bahan baku.<sup>15</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>16</sup> Harus diakui jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis.

Dapat dilihat jika negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan pasti tinggi. Oleh karena itu lembaga keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Faisal Abdullah, 2004, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang. hlm. 16.

<sup>16</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011) hlm. 5.

<sup>17</sup> Hermansyah, op. cit., hlm. 35.

Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>18</sup>

Masyarakat mengenal lembaga jasa keuangan dalam dua bentuk yaitu: bank dan bukan bank. Kedua lembaga ini telah begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pemecah solusi dari setiap masalah yang timbul.

Secara praktis kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai *agent of development*. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja namun lebih dari itu yaitu sebagai pendorong pembangunan.

### 3. Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya paham keuangan, menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku

---

<sup>18</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat. 2011), hlm. 10.

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*”, *Direktorat Literasi dan Edukasi* (2014), 4.

masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :Bagaimana Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Untuk mengetahui peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

#### 2. Manfaat

Memperkuat ilmu pengetahuan khususnya tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

##### a. Bagi subyek peneliti

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi OJK Purwokerto terkait peningkatan literasi keuangan pada masyarakat.

##### b. Bagi penelitian

penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

## E. Kajian Pustaka

Berbicara tentang objek penelitian yang berjudul Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan, sejatinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti:

Studi yang dilakukan oleh Cintiya Meidia Tama dalam skripsinya yang berjudul *Studi Financial Inclusion dan Financial Deepening di Indonesia 2015*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Transaksi ekonomi membutuhkan suatu sistem keuangan yang baik agar tidak salah dalam pemilihan layanan keuangan yang berkembang dimasyarakat yang sifatnya merugikan. Ekspansi layanan keuangan dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan dengan beberapa strategi yang dipergunakan oleh pengambil keputusan, sebangun dengan hal tersebut kondisi perbankan menjadi perhatian khusus yaitu menjaga perbankan dalam keadaan yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik. Oleh sebab itu, strategi *financial inclusion* dan *financial deepening* dianggap tepat dalam merespon masalah keuangan dan melakukan pembangunan keuangan secara kontinyu sehingga menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.<sup>20</sup>

Bachtiar Hassan Miraza dalam jurnal *Membangun Keuangan Inklusif*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, pengembangan keuangan inklusif seharusnya merupakan tanggung jawab sosial lembaga keuangan bagi

---

<sup>20</sup> Cintiya Meidia Tama, "*Studi Financial Inclusion dan Financial Deepening di Indonesia*". 2015.

masyarakat kelas bawah/informal yang selalu menjadi bulan bulanan guncangan ekonomi formal dari dinamika ekonomi formal. Ini tidak menyangkut sentimen formal dan informal tapi menyangkut pada keseimbangan hidup dalam masyarakat dan menyangkut menghidupkan potensi yang tersimpan pada diri masyarakat kelas bawah.<sup>21</sup>

Dalam penelitian skripsi oleh Adib Gusta yang berjudul “*Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap literasi keuangan di pasar Koga Bandar Lampung. Populasi atau sample dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang ada di daerah pasar koga Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Diskriptif. Hasil menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang ada di Pasar Koga Bandar Lampung tergolong pada kriteria *well literate*, tingkat gender dan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Kepemilikan akun yang dimiliki para pemilik UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung didominasi oleh produk perbankan.<sup>22</sup>

Skripsi oleh Mochammad Zakki Zahriyan “*Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga*” hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen keuangan sangat penting yang harus dimiliki pada setiap individu maupun keluarga yang mana

---

<sup>21</sup> Jurnal Skripsi, Bahchtiar Hassan Mirza, *Membangun Keuangan Inklusif*, Guru Besar Fak. Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

<sup>22</sup> Adib Gusta, *Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*, (Bandar Lampung, 2016), hlm, 10.

manajemen keuangan sendiri bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap keuangan sehingga terjadi *well literate* atau pengetahuan terhadap keuangan sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan dalam mengelola uang dalam sebuah penggunaan. Manajemen itu sendiri adalah sebuah bentuk dari literisasi keuangan.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Frans Julians yang berjudul *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, konsentrasi, dan indeks prestasi kumulatif. Data dalam Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode kualitatif (deskriptif) Variabel penelitian ada empat, yaitu jenis kelamin, konsentrasi, dan indeks prestasi kumulatif termasuk dalam variabel bebas atau X, sedangkan literasi keuangan termasuk dalam variabel terikat atau Y. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin

---

<sup>23</sup> Mochammad Zakki Zahriyan, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga”(Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2016), hlm.15.

,program studi, dan IPK tergolong dalam kategori tinggi, dengan persentase jenis kelamin 80,75%, program studi 70,5%, dan IPK 74%.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Willy yang berjudul *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang*. penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi di STIE Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang dapat disimpulkan bahwa, aspek-aspek dari literasi keuangan diantaranya pengetahuan umum keuangan pribadi, simpanan dan pinjaman, asuransi, dan investasi secara simultan (keseluruhan) memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dosen, karyawan, dan mahasiswa di STIE Multi Data Palembang.<sup>25</sup>

Dalam jurnal Lusardi, *Mitchell The Economics Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*, menerangkan bahwa edukasi terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan manusia yang berwawasan luas dan memiliki pandangan ke depan khususnya dalam pengetahuan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Frans Julians, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (Pekan Baru, Riau: Universitas Syarif Kasim Riau), hlm.20.

<sup>25</sup> Welly, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang*, (Paalembang: Universitas STIE Data Palembang, 2014), hlm. 18.

<sup>26</sup> Lusardi, *Mitchell The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.*, di unduh pada tanggal 12 Juli 2017, Pukul 10:00 Wib.

Dalam bukunya Nusron Wahid yang berjudul *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, dalam upaya mewujudkan *financial inclusion* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses. Tahapan mewujudkan *financial inclusion* dapat dibagi menjadi empat tahapan penting, yaitu tahap *literacy*, *penetration*, *density*, dan *delivery*.<sup>27</sup>

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adib Gusta 2016	Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung	sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan	perbedaan yaitu penelitian tersebut meneliti pada tingkat literasi di UMKM
2.	Mochammad Zakki Zahriyan 2016	Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga	sama-sama meneliti tentang literasi keuangan	perbedaan yaitu penelitian ini mengarah kepada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga
3.	Frans Julians 2014	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan	perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada tingkat literasi pada mahasiswa
4.	Welly 2016	Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang	sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan	perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada keputusan investasi

Sumber: Data Sekunder Diolah

<sup>27</sup> *Ibid*



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep Literasi Keuangan, dan Peran OJK.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data-data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yakni profil atau gambaran umum mengenai OJK Purwokerto. Selanjutnya, menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

BAB V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditunjukkan untuk pihak terkait baik masyarakat, OJK, mahasiswa dan sebagainya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Literasi Keuangan

##### 1. Pengertian

Definisi literasi keuangan sangat bervariasi, seperti beberapa diantaranya, Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan *literacy financial* sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*Knowledge and Ability*). Menurut Lusardi dan Mitchell (2014) *The economic importance of financial literacy theory and evidence* dimana dijelaskan strategi literasi keuangan dilaksanakan dengan menggunakan strategi edukasi yang sesuai dengan kelompok atau dengan kata lain sesuai dengan tingkatan masyarakat seperti tingkat pendidikan, strata sosial, dan kelompok usia. Sementara itu, Dones dan Hira (1987) serta Chen dan Volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan (*Financial Literacy is Money Management Knowledge*).<sup>28</sup>

Adapun literasi keuangan adalah menurut The President Advisory Council On Financial Literacy (PACFL, 2008) dalam Hung (2009) mendefinisikan *Financial Literacy: the ability to use knowledge and skills to manage financial resource effectively for a lifetime of financial well being*. (literasi keuangan adalah sebagai kemampuan untuk

---

<sup>28</sup>Lusardi, A & Mitchell, O.S. "BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth". *Journal of Monetary Economics*, 2007 54(1), hlm.205-224.

menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan). Literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut (mengaplikasikannya) untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Sedangkan menurut pendapat ahli (Kaly, Hudson dan Vush 2008) dalam penelitian Widyawati (2012) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku.<sup>29</sup>

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang OJK mengatakan bahwa hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya

---

<sup>29</sup> Widayati, Irin. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1 (1): hlm. 89-99.

pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu.<sup>30</sup> Terhadap investasi-investasi bodong.

Literasi keuangan juga merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini mengandung muatan-muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting dalam sektor keuangan, tanpa bisa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan.<sup>31</sup>

Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik.

Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu *literasi, penetration, density, dan delivery*.<sup>32</sup>

a. *Literacy* merupakan perangkat utama dalam mewujudkan *financial inclusion*, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang di

---

<sup>30</sup> SBY Resmikan Blueprint Literasi Keuangan".www.sindonews.com diunduh pada 20 November 2016.

<sup>31</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan.*, Gramedia, 2014., Jakarta, hlm 102.

<sup>32</sup> *Ibid*

lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi *well literate* dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk *implementasi*.<sup>33</sup>

Edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dilakukan dengan menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.

b. *Penetration* merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan.<sup>34</sup> Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah *supply side* layanan keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

---

<sup>33</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

<sup>34</sup>Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan.*, Gramedia, 2014., Jakarta, hlm 102.

bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, *training of trainer*, edu expo.

c. *Density* merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi *Density*.

d. *Delivery* merupakan tahap dimana literasi keuangan dan *financial inclusion* sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (*delivery channel*) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, dan murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Literasi Keuangan**

Yang menjadi dasar adanya program literasi keuangan adalah adanya temuan dari data Bank Dunia bahwa tingkat akses masyarakat indonesia ke lembaga keuangan formal hanya sebesar 36,1% atau lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu pula yang menjadi alasan pentingnya literasi keuangan adalah angka rasio savings to GDP indonesia yaitu

---

<sup>35</sup> *Ibid*

sekitar 31%, lebih rendah dari Singapura sebesar 49%, Philipina sebesar 46%, serta China 49%.<sup>36</sup>

Hal ini dipengaruhi juga tingkat literasi masyarakat Indonesia yang mana pengertian dari literasi keuangan sendiri adalah setiap orang memiliki pengetahuan yang memadai untuk merencanakan dan mengatur keuangan pribadinya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapatan seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen (*mismanagement*) keuangan (Krishna Et.al., 2010).<sup>37</sup>

### **3. Indikator Literasi Keuangan**

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa

---

<sup>36</sup>Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/2016.

<sup>37</sup>Krishna, Ayu; Rofaida, Rofi; Sari, Maya. 2010. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya" [www.file.upi.edu](http://www.file.upi.edu) diunduh pada 18 April 2017.

keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>[www.Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id) di akses pada tanggal 03 April 2017, Pukul 20:00 Wib.



#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan**

Berdasarkan hasil survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Pendidikan**

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.

##### **2. Strata Sosial**

Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikelompokkan atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.

##### **3. Kelompok Usia**

Semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

#### **5. Strategi Literasi Keuangan Oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)**

Strategi nasional literasi keuangan indonesia memiliki 3 pilar dimana pilar dimaksud diuraikan dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif. Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang *well literate*. Adapun kerangka strategi nasional literasi keuangan indonesia adalah :

---

<sup>39</sup>Hasil Interview dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) Pada Tanggal 31 Mei 2017., Pukul 13:00 Wib.

1. Pilar ke 1 adalah Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, yang di dukung dengan program strategis yaitu Menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang meliputi program inisiatif yaitu:<sup>40</sup>
  - a. Menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.
  - b. Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi.
  - c. Menyusun materi kampanye literasi keuangan.
  - d. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan.
  - e. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum.
  - f. Melaksanakan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.
2. Pilar ke 2 adalah Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, yang didukung dengan program strategis menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang di dukung dengan program inisiatif seperti :

---

<sup>40</sup>*Ibid*

- a. Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye literasi keuangan.
  - b. Membangun sarana media komunikasi.
  - c. Menyiapkan SDM pelaksan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
  - d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
  - e. Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksana literasi keuangan.
  - f. mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan.
3. Pilar ke 3 adalah Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, yang didukung dengan program strategis yaitu mengembangkan dan memasarkan produk jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan didukung pula dengan program inisiatif seperti:
- a. Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan.
  - b. Menciptakan produk dan jasa keuanga yang bersifat *bundling* (sinergi produk dan jasa antar sektor keuangan guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan).
  - c. Mendorong sektor jasa keuangan untu memperluas aksesibilitas.

- d. Mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.<sup>41</sup>

## 6. Tujuan Literasi Keuangan

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:
2. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.* Siaran Pers OJK.

## **B. OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )**

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>43</sup>

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

<sup>44</sup>Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media. hlm. 21.

## Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

### a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

### b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

## Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

### a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

#### 1. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

#### 2. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( *forward looking* ) serta dapat berfikir diluar kebiasaan ( *out of the box thinking* ).<sup>45</sup>

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun

---

<sup>45</sup>Kasmir, S.E., 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi-cet. 14. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 325

lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal.<sup>46</sup>

Salah satu tugas yang menjadi fokus OJK adalah dengan melaksanakan strategi nasional literasi keuangan yang mana literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola keuangan guna dapat menggunakan keuangan dengan lebih baik.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategi nasional literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama. *Pertama*, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. *Kedua*, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. *Ketiga*, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa

---

<sup>46</sup>Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 21.



keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>47</sup>

### **C. Strategi Literasi Keuangan**

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

---

<sup>47</sup>[www.Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id), diakses pada tanggal 05 April 2017, Pukul 19:50.

4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dengan hasil survei tersebut OJK bersama IJK menyusun strategi nasional literasi keuangan indonesia SNILK yang di dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.<sup>48</sup>

Beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama IJK. Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, *training of trainer*, *outreach* program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, *edu expo*, bioskop keliling, wayangan dan simolek dengan target edukasi yaitu perempuan/ibu rumah tangga, UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, profesional, karyawan dan pensiunan.

Menurut PACFL (2008) didalam pengukuran literasi keuangan pertama dimulai dari pengetahuan tentang keuangan (*financial knowledge*) sesudah itu lalu masuk kedalam tahap keterampilan keuangan (*financial skill*) dan pengetahuan yang dimiliki di dalam diri (*perceived knowledge*), dan terakhir baru masuk kedalam tahap perilaku keuangan (*financial behavior*), setelah itu dilakukan maka literasi keuangan seseorang dapat diukur, meskipun pengukurannya tidak akan tepat sekali.

---

<sup>48</sup>*ibid*

OJK Dalam program strategi ini dicanangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.

1. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
2. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan.
3. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

Penerapan ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan sendiri menerapkan strategi nasional literasi keuangan dengan tiga pilar.<sup>49</sup>

Selain itu literasi keuangan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sistem inklusi keuangan, yang mana inklusi keuangan adalah dalam bahasa inggris disebutkan *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*,<sup>50</sup> yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif. Inklusivitas sistem keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan.

---

<sup>49</sup> <http://www.williamperkasa.com/2013/11/OJK-luncurkan-program-strategi-nasional-literasi-keuangan.html>. Sumber ekonomi inilah. com, diakses pada tanggal 05 April 2017, Pukul 21:10.

<sup>50</sup> Brigit Helms, *Access for All: Building Inclusive Financial System* (Washington, D.C.,:The World Bank, 2006), hlm.2.

*Financial inclusion* merupakan satu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah.<sup>51</sup>

Merujuk definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terminologi *Financial inclusion* mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak *bankable* serta mereka yang menjalankan usaha di daerah perdesaan.

Oleh karena itu, program strategis yang telah dicanangkan dalam Strategi Nasional Financial Inclusion dan Strategi Nasional Financial Literacy harus menjadi komitmen yang terus menerus, agar dapat berkelanjutan, program *financial inclusion* harus disesuaikan dengan profil dan karakteristik berbagai kelompok masyarakat dan juga harus memiliki alasan bisnis, bukan hanya menjadi program amal. Selain itu, inisiatif dalam rangka penguatan perlindungan konsumen juga perlu di dorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*ibid*

<sup>52</sup>Nusron Wahid, *Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014, hlm. 51-60).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran).<sup>53</sup> Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban-jawaban atas perumusan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.<sup>54</sup>

Penelitian ini diawali dengan adanya hasil survei dari OJK pusat, yaitu melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan. Sedangkan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tandan, atau gambaran tertentu.<sup>55</sup> Dalam

---

<sup>53</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21.

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 10.

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, hlm. 12.

penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di daerah Purwokerto.

## **B. Jenis Data**

Menurut jenisnya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.<sup>56</sup>

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti literasi keuangan dalam buku Untuk Indonesia yang Kuat: 100 Langkah untuk Tidak Miskin, Literate., Hananto, Iqbal. 2011., Jakarta.

Untuk mendapat data primer dari penelitian ini, maka penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara purposive sampling pada Karyawan Kantor OJK Purwokerto.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis dapat berupa buku-buku, berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>57</sup> Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang dapat mendukung penulis untuk lebih menguatkan sumber data penelitian.

---

<sup>56</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

<sup>57</sup> Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Purwokerto: STAIN Perss, 2014), hlm. 7.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) Purwokerto dengan alamat kantor: Jl. Gerilya No. 365 Karang Pucung. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 20 Januari 2017 sampai Mei 2017.

### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian, subjek peneliti merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto. Sedangkan objek utama dalam penelitian ini adalah Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

#### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini yaitu Peran OJK Purwokerto dalam usaha meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

#### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.<sup>59</sup> Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1992), hlm. 119.

<sup>59</sup>. Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Purwokerto: STAIN Perss, 2014), hlm. 88.

memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Karyawan OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) Purwokerto dan sekaligus data-data jumlah peningkatan Literasi dari tahun 2011 sampai 2016 berupa dokumen yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.

### **1. Metode Observasi**

Metode Observasi adalah merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>60</sup> pengukuran tersebut dilakukan dengan observasi secara tidak langsung.

Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah data-data yang diperlukan terkait dengan usaha OJK meningkatkan literasi keuangan. Oleh karena itu, teknik observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan.

---

<sup>60</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 30.



## 2. Metode Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.<sup>61</sup>

Dalam pelaksanaannya metode studi dokumentasi akan dilakukan oleh penulis terhadap informan penelitian yaitu pimpinan OJK Purwokerto yaitu Bapak Farid Faletahan ( Kepala Kantor OJK Purwokerto ), dan Ibu Suwaryanti ( Bidang EPK ). Ibu Nunke ( Bidang Manajemen Internal ) secara detail tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan, diantaranya tentang:

1. Profil OJK Purwokerto
2. Bagaimana aplikasi strategi OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.
3. Program apa saja yang dilakukan OJK Purwokerto dalam kaitanya dengan literasi keuangan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

4. Pengumpulan data terkait Literasi keuangan

5. Program sosialisasi di Kantor OJK Purwokerto

Metode pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen yang ada dan hasil pemaparan dari surat balasan OJK mengenai literasi keuangan adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian ini, karena data-data yang diperoleh nantinya lebih lengkap dan akurat dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan-informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, internet, dan media lainnya. Data yang diharapkan diperoleh melalui metode ini yaitu mengenai kegiatan program-program OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan upaya mencari tata hubungan secara sistematis antara kajian buku, analisis isi artikel, catatan hasil lapangan, sampling purposive dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. dalam model interaktif, analisis data memungkinkan dilakukan pada waktu peneliti berada di tempat penelitian dengan mengenali subjek secara lebih cermat. Berkaitan dengan hal ini, Sudarsono menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan dilakukannya analisis pada waktu peneliti berada

di lapangan (*within site, in the field*) maupun sesudah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frasa atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.<sup>62</sup>

Metode Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).<sup>63</sup> Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi buku, teks, artikel, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> V. Wiratana Sujarweni, *Metedologi Penelitian, Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 33.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

<sup>64</sup> Sudarwan Daim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

## G. Uji Keabsahan Data

uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibitas) dan *confrimability* (obyektivitas). Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini di uji keabsahannya menggunakan teknik bahan referensi.

### a. Uji Keabsahan Data Menggunakan Bahan Referensi

yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.<sup>65</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan hasil dokumentasi seperti surat, naskah, jurnal, foto maupun artikel yang di dalamnya terdapat mengenai materi OJK Purwokerto mengenai literasi keuangan.

Dalam hal ini peneliti merangkum surat yang di berikan OJK Purwokerto mengenai literasi keuangan bahwa OJK Purwokerto sebagai regulator literasi keuangan akan melaksanakan startegi nasional literasi keuangan Indonesia yang memiliki 3 pilar dan diuraikan ke dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif.

Ke tiga pilar tersebut adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrakstrukture literasi keuangan, pengembangan produk dan jasa keuangan. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OJK Purwokerto antara lain:

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm,10.

- 1). Sosialisasi atau Edukasi.
- 2). Seminar.
- 3). Lomba Cerdas Cermat.
- 4). Pasar Keuangan Rakyat.
- 5). Kuliah Umum
- 6). *Press Confrence*
- 7). Jalan Sehat.
- 8). Kunjungan
- 9). Pasar Keuangan Syariah
- 10). *Training of Trainers*
- 11). Gerakan Inklusi Keuangan.
- 12). Talkshow
- 13). *Focus Group Discussion (FGD)*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum OJK Purwokerto**

##### **1. Sejarah berdirinya OJK Purwokerto**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan peneylidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>66</sup>

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai

---

<sup>66</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pengorganisasian dan tata kelola pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

## **2. Profil OJK Purwokerto**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir di Purwokerto sejak tanggal 31 Desember 2013 dan membawahi wilayah kerja eks Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap). OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Pada hari Selasa, 7 April 2015 Kantor OJK Purwokerto diresmikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Muliaman D. Hadad yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kantor OJK yang baru diresmikan ini beralamat di Jl. Gerilya, No. 365, Purwokerto, Jawa Tengah.<sup>67</sup> 53144, No. Telp. (0281) 6578041

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseleruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu

---

<sup>67</sup>Majalah Bawor 2015, hlm. 12.

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sebagai lembaga baru dengan cakupan tugas yang cukup luas, kantor OJK Purwokerto menyadari perlunya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan fungsi, tugas dan wewenangnya. Berbagai kegiatan edukasi telah diselenggarakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap lembaga jasa keuangan.

### **3. Landasan Hukum OJK Purwokerto**

#### a. Landasan Filosofis:

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

#### b. Landasan Yuridis:

- a. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. UU No. 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.

#### c. Landasan Sosiologis:

- 1). Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis,



dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

- 2).adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (*konglomerasi*) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- 3).banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.<sup>68</sup>

#### **4. Visi dan Misi OJK Purwokerto**

##### Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

###### a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

###### b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

---

<sup>68</sup>Kasmir, S.E., 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi-cet. 14. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm.325

berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

## Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

### a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

#### 1). Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

#### 2). Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

#### 3). Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### 4). Inklusif

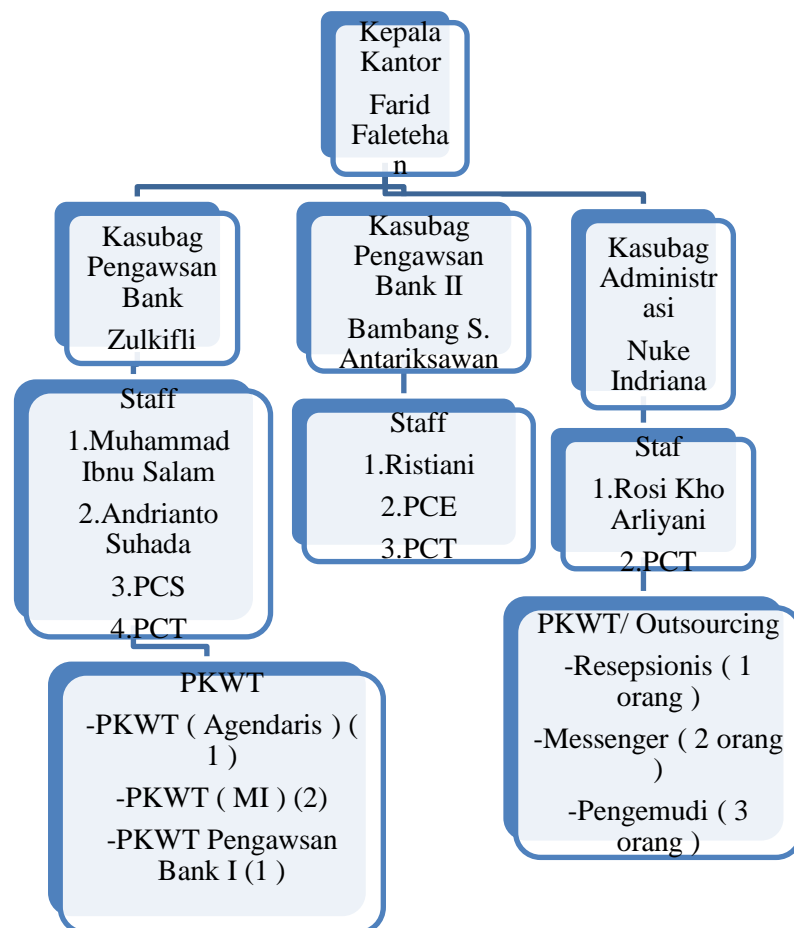
Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

5. visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( *forward looking* ) serta dapat berfikir diluar kebiasaan ( *out of the box thinking* ).<sup>69</sup>

**5. Struktur Organisasi OJK Purwokerto**

**Gambar 1.**  
**Susunan Organisasi OJK Purwokerto**



<sup>69</sup>Kasmir, S.E., 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi-cet. 14. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 325.

## **B. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan**

OJK Purwokerto yang berdiri berdasarkan legalitas dari pemerintah yakni Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang ini.

Untuk mengetahui peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yaitu dengan melaksanakan strategi nasional literasi keuangan yang memiliki 3 pilar,<sup>70</sup> ketiga pilar ini merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang *well literate*. Adapun ke tiga pilar tersebut adalah :

### **a. Pilar 1, Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan**

Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan yang di lakukan oleh OJK yaitu dengan menyusun program edukasi dan melaksanakan program edukasi serta kampanye nasional literasi keuangan.

OJK Purwokerto selain melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, juga melakukan tugas edukasi dan perlindungan konsumen. OJK telah melaksanakan 77 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang ditunjukan kepada UMKM, pelajar / mahasiswa, pondok

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan OJK Purwokerto pada Tanggal 30 Mei 2017

pesantren, guru, PNS, dosen, kelompok profesi dan masyarakat lainnya.

Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut antara lain berupa :

Pembentukan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyumas yang dibentuk pada tanggal 1 April 2016 dengan SK Bupati Nomor 500/375/2016 bertempat di kantor Kabupaten Banyumas pada bidang Setda Bagian Ekonomi.

### Struktur organisasi TPAKD Kabupaten Banyumas

**Tabel 1.2.**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI BANYUMAS	KETUA PENGARAH
2.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN OTORITAS JASA KEUANGAN PURWOKERTO	PENGARAH I
3.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PURWOKERTO	PENGARAH II
4.	SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWOKERTO	KETUA
5.	DEPUTI KEPALA KANTOR PERWAKILAN OTORITAS JASA KEUANGAN PURWOKERTO	WAKIL KETUA
6.	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN BANYUMAS	SEKERTARIS I
7.	KEPALA SUB BAGIAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KANTOR PERWAKILAN OTORITAS JASA KEUANGAN	SEKERTARIS II

	PURWOKERTO	
8.	DEPUTI KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PURWOKERTO	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
14.	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS	ANGGOTA

Dalam rangka mewujudkan efektifitas TPAKD membentuk 3 pokja,  
yaitu:<sup>71</sup>

1. Pokja ukkm dan industri kreatif,
2. Pokja pertanian,
3. Pokja edukasi dan sosialisasi.

---

<sup>71</sup>www. SuaraMerdekaCetak.com., di akses pada tanggal 29/05/2017. Pada pukul 09:09 WIB.

Pembentukan Forum Komunikasi Jasa Keuangan (FKJK) Kabupaten Banyumas yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 2017 bertempat di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas tujuan dibentuknya FKJK Purwokerto adalah menjadi media yang mewadahi koordinasi, kerja sama dan hubungan dari masing-masing sektor lembaga jasa keuangan.

Penyelenggaraan Gebyar Ekonomi Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Oktober 2016 yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia dan Industri Jasa Keuangan Syariah yang meliputi perbankan syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan LKM Syariah, perusahaan sekuritas dan aset manajemen.

Latar belakang diselenggarakan dengan beberapa alasan. *Pertama*, masih kurangnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap produk/ jasa keuangan syariah. *Kedua*, kegiatan bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, Self Regulation Organization (SRO), serta Industri Keuangan Syariah (Perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah). *Ketiga*, implementasi working group SiKOMPAK Syariah (Sinergi Komunikasi & Pemasaran Bersama Keuangan Syariah). *Keempat*, kampanye gerakan “ Aku Cinta Keuangan Syariah” dan “Yuk Nabung Saham”.

Tujuan kegiatan Gebyar Syariaah 2016 ini adalah guna meningkatkan pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariaah, mendekatkan serta mengajak masyarakat kepada lembaga keuangan syariaah. Kegiatan ini terdiri dari beberapa acara antara

lain *Training on Trainers* (TOT) keuangan syariah untuk para dosen ekonomi dan keuangan Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, seminar yang diselenggarakan BI dengan MES, peresmian Galeri Investasi Syariah di Universitas Muhamadiyah Purwokerto.<sup>72</sup>

Pembentukan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang dana masyarakat dan investasi (Satgas Waspada Investasi) bidang pengelolaan investasi satgas waspada investasi merupakan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum, dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 27/KDK.01/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 bertempat di Aula Hotel Aston.

Latar belakang dibentuknya satgas ini dikarenakan banyaknya praktek berkedok investasi tak berizin di masyarakat dan cenderung mengakibatkan kerugian materil dan berdampak negative terhadap produk investasi yang punya legalitas perizinan dari regulator atau pengawas.<sup>73</sup>

Program tersebut dilakukan dalam setahun dengan dibagi menjadi program triwulanan.

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada program edukasi yang di buat sudah baik dengan berbagai bentuk program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, agar program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan dapat berjalan efektif dan

---

<sup>72</sup>[www.akucintakeuangansyariah.com/ACKS](http://www.akucintakeuangansyariah.com/ACKS). Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2017 Pukul 13:03 WIB.

<sup>73</sup>[https://www.1news.id/2016/12/ojk\\_banyumas\\_bentuk\\_satgas\\_cegah\\_investasi\\_bodong](https://www.1news.id/2016/12/ojk_banyumas_bentuk_satgas_cegah_investasi_bodong) , diakses Pada Tanggal 19 Juni 2017., Pada Pukul 13:24 WIB.



menyeluruh secara optimal maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih ini dikarenakan wilayah kerja kantor OJK Purwokerto yang sangat luas meliputi eks karisedenan Banyumas yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan untuk waktu pelaksanaan perlu lebih ditingkatkan lagi dan lokasi diselenggarakannya program tersebut jangan terpaku di daerah Purwokerto saja.

#### b. Pilar ke 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

Penguatan infrastruktur literasi keuangan adalah dengan menyusun database materi dan sistem informasi dan juga menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan pilar ini dilakukan dengan menyelenggarakan survei untuk mengetahui tingkat literasi dan utilitas masyarakat.

Dalam penguatan infrastruktur literasi keuangan OJK Purwokerto bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah kerjasama melalui MoU, mini website, dan mobil edukasi konsumen yang dipergunakan untuk menjangkau atau melayani masyarakat di daerah terpencil.

MoU yang dilakukan oleh OJK Purwokerto dengan berbagai pihak diantara lain dengan:

Salah satu kampus yang ada dipurwokerto yaitu Universitas Jendral Soedirman dalam penandatanganan nota kesepahaman, senin 3 Oktober 2016 di gedung Roedhiro FEB, Unsoed. Rektor, Dr. Ir Achmad Iqbal, M.Si dan Kepala OJK Purwokerto, Farid Faletahan, S.T.,MM yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian.<sup>74</sup> Dengan akademisi di dalamnya di harapkan dapat menunjukkan eksistensi dan perannya dalam mengatasi berbagai persoalan termasuk masalah keuangan.

OJK Purwokerto juga menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Hal ini ditunjukannya dengan adanya kerjasama antara OJK Purwokerto dan IAIN Purwokerto yang di buat pada tanggal 17 September 2016 bertempat di Auditorium Utama IAIN Purwokerto.

Begitu juga dengan kerjasama yang di jalin oleh OJK Purwokerto dan Universitas Muhamadiyah Purwokerto adalah dengan mengadakan acara gebyar syariah 2016 pada sabtu dan minggu pada tanggal 1-2 Oktober 2016 di alun-alun kota purwokerto dan Universitas Muhamadiyah Purwokerto.

Selain itu juga bekerjasama dengan SMK Taman Siswa dengan memberikan materi tentang sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan, dan berbagai lembaga jasa Keuangan, dengan membuat berbagai produk jasa yang dapat di akses seluruh lapisan masyarakat.

Media masa lokal seperti Radar Banyumas, Satelit Pos dengan menggandeng media masa lokal tersebut kegiatan yang di lakukan oleh OJK dengan para *stakeholder* di harapkan OJK dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kegiatan yang telah di lakukan.

---

<sup>74</sup>[www.unsoed.ac.id/id/berita/unsoed](http://www.unsoed.ac.id/id/berita/unsoed) dan ojk purwokerto tandatangani nota kesepahaman. Di akses Tanggal 19 Juni 2017., Pada Pukul 13:39 WIB.

Mini website yang dapat dikunjungi adalah [www.ojk.purwokerto.go.id](http://www.ojk.purwokerto.go.id) atau [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), juga dapat di kunjungi di [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id) yang mana di dalam website tersebut terdapat berbagai informasi seputar OJK, dan Kegiatan OJK.

Selain itu OJK juga melaksanakan gerakan inklusi keuangan nasional dalam bentuk penyelenggaraan desa inklusi yang bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan di 8 desa /kecamatan se karisedenan Banyumas.

OJK purwokerto juga mengadakan training of the trainers, edukasi bagi UMKM, sosialisasi bersama mahasiswa KKN, kuliah umum serta menerima berbagai kunjungan mahasiswa Unsoed, IAIN Purwokerto, dan SMK Taman Siswa dengan agenda pengenalan OJK dan lembaga keuangan.<sup>75</sup>

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada program pilar ke dua ini perlu ditingkatkan dalam program kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan edukasi literasi keuangan yang lebih efektif dan efisien yang optimal dan berkesinambungan, tidak hanya dengan perguruan tinggi saja melainkan dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya, menjalin kerjasama dengan komunitas - komunitas masyarakat, buruh dan lain sebagainya.

---

<sup>75</sup>Diambil dari situs BanyumasNews.com, di akses pada Tanggal 29/05/2017., pada Pukul 09:09.

### c. Pilar ke 3 Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan

Mengembangkan dan memasarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh OJK Purwokerto adalah dengan diluncurkannya program Laku Semar yang dibentuk pada tanggal 18 Mei 2017 di Pasar Sokaraja, sebagai bentuk pengembangan produk jasa keuangan, program tersebut di tunjukan untuk membantu pedagang kecil agar tidak terjerat retener, dalam program Laku semar pedagang bisa mendapatkan pinjaman dari bank penyelenggara berkisar Rp. 100 ribu hingga 3 juta tanpa agunan dan langsung cair dengan bunga maksimal 2 persen dan dari 27 BPR konvensional maupun syariah, baru 9 BPR konvensional maupun syariah yang turut menyelenggarakan program laku semar.<sup>76</sup>

Adapula pembentukan program LKM Layanan Keuangan Mikroyang dibentuk pada tahun 2016 merupakan Lembaga Keuangan yang di dirikan dengan tujuan untuk mendorong usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat, mengingat jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jumlah yang relative kecil.<sup>77</sup> Di wilayah Banyumas sendiri kegiatan LKM baru sebatas sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

Propinsi jawa tengah merupakan propinsi pertama di indonesia yang diberikan ijin usaha LKM oleh OJK pada tahun 2016 terdapat 6 LKM di eks karisedenan Banyumas yang telah di kukuhkan. LKM merupakan

---

<sup>76</sup>Republika.co.id, Banyumas., Di akses Pada Tanggal 19 Juni 2017, Pada Pukul 14:47 WIB.

<sup>77</sup>BanyumasNews.com., Diakses pada tanggal 29 Mei 2017, Pada Pukul 19:09 Wib.

lembaga mikro keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat mengingat jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jumlah yang relative kecil.<sup>78</sup>

Selain LKM ada pula terobosan baru guna mengembangkan produk/jasa keuangan dalam hal pelayanan yaitu dengan adanya LAKU PANDAI yaitu layanan transaksi keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif ( Laku Pandai ). Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) purwokerto mencatat sampai dengan 2016 laku pandai di wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap ada 6.589 agen dengan total transaksi Rp. 5,83 miliar. OJK sampai saat ini masih mendorong perbankan di wilayah kerjanya untuk terlibat dalam program Laku Pandai guna meningkatkan literasi keuangan dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengembangan produk yang dilakukan OJK bersama LJK sudah tepat di mana pengembangan produk tersebut dapat menyentuh kepada masyarakat kecil, namun ada yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan produk jasa keuangan yang dapat menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan agar lebih mudah diperoleh masyarakat.

Kedepannya OJK Purwokerto telah menyusun program kerja dalam rangka literasi keuangan masyarakat dengan segmen karyawan, pensiunan, pelajar dan profesi lainnya. Diantaranya adalah edukasi UMKM di

---

<sup>78</sup>Kepala Kantor OJK Purwokerto, Farid Faletihan dalam interviewnya dengan BanyumasNews.com.

<sup>79</sup>Suara Merdeka.com, diakses Pada Tanggal 17 Juni 2017., Pada Pukul 14:29 WIB.

beberapa kabupaten, edukasi kepada nelayan, OJK mengajar di sekolah, gerakan inklusi keuangan dalam bentuk desa inklusi keuangan di 4 kabupaten, sosialisasi kepada ibu rumah tangga, dan program kredit mikro di bawah Rp. 3 juta dalam rangka mengurangi dampak negative kreditur informal dan renternir.<sup>80</sup>

### **C. Analisis Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat**

Untuk mengetahui peran OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat dilakukan wawancara terhadap para karyawan OJK Purwokerto hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai peran OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai program**

Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan semakin gencar di lakukan OJK Purwokerto dimana kemampuan OJK Purwokerto dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga informasi mengenai kegiatan tersampaikan. Masyarakat harus diberi pengertian mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan baik individual maupun kelompok. Sosialisasi dan edukasi yang di lakukan oleh

---

<sup>80</sup>BanyumsNews.com, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09 WIB.

OJK Purwokerto adalah merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dalam khususnya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. oleh karena itu, sosialisasi atau edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber data dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

OJK Purwokerto melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan dengan berbagai cara yang dilakukan yakni dengan :<sup>81</sup>

a. Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi mengenai literasi keuangan telah melaksanakan 77 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang diantaranya ditujukan kepada UMKM, pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, guru, PNS, dosen, kelompok profesi dan masyarakat lainnya.

Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut antara lain berupa pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyumas, pembentukan Forum Komunikasi Jasa Keuangan (FKJK), penyelenggaraan Gebyar Ekonomi Syariah, Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang dana masyarakat dan investasi (Satgas Waspada Investasi).<sup>82</sup> Di berbagai tempat eks karisedenan Banyumas.

b. Melalui Media Masa

---

<sup>81</sup>Suara Merdeka Cetak, desember 15, 2016.,2018 *Literasi Keuangan Capai 30%*, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09.

<sup>82</sup>BanyumsNews.com, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09 WIB.

sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Media elektronik menggunakan radio ataupun stasiun televisi lokal adapun yang menjadi mitra OJK Purwokerto yaitu dengan Satelit Pos dan juga media cetak Radar Banyumas.

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh OJK Purwokerto dapat termuat di koran-koran atau media cetak. Di bagian internal sendiri OJK juga memiliki majalah mengenai OJK namun belum dapat dikonsumsi untuk masyarakat umum hanya untuk kalangan internal OJK Purwokerto saja.

Salah satu berita yang termuat di harian umum Satelit Pos adalah berita kegiatan dalam rangka memperingati HUT OJK Purwokerto yang ke empat seperti yang termuat dalam jumpa pers di Kantor OJK Purwokerto.

OJK Purwokerto akan menyelenggarakan jalan sehat bersama 2000 pelajar yang terdiri dari 40 SD dan 20 SMP di wilayah purwokerto

c. Secara langsung

sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui 2 sistem yaitu, *Pertama*, sosialisai secara langsung yang dilakukan oleh karyawan OJK kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. *Kedua*, masyarakat yang berkonsultasi secara langsung datang ke kantor OJK Purwokerto.



## **2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi melalui pembentukan program literasi keuangan**

Tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan mengubah sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.<sup>83</sup>

Untuk meningkatkan pertumbuhan literasi keuangan OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di setiap kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Sampai saat ini baru terbentuk delapan TPAKD di tingkat kabupaten/kota di Jateng, meliputi, TPAKD kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Surakarta.<sup>84</sup>

Pada tahun ini program kerja TPAKD, yaitu memfasilitasi pembiayaan lembaga jasa keuangan ke sektor UMKM/*start up bussiness*, implementasi gerakan budaya menabung bagi pelajar, peningkatan jumlah agen Laku Pandai di daerah dan *asistensi* UMKM masuk bursa.

TPAKD Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah adalah forum koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong

---

<sup>83</sup>RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan, BAB II, Pasal 2 dan 3.

<sup>84</sup>Suara Merdeka Cetak, desember 15, 2016.,2018 *Literasi Keuangan Capai 30%*, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09.

pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Hadirnya TPAKD ini bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat daerah. Selain itu TPAKD akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.<sup>85</sup>

OJK Purwokerto sendiri telah meluncurkan Program Layanan Keuangan sebagai upaya memberantas renternir atau yang di singkat menjadi Lakusemar yang dilaksanakan di Pasar Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017. Peluncuran program lakusemar ini di tandai dengan penandatanganan naskah perjanjian pinjaman oleh beberapa pedagang yang disaksikan oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dan Kepala Kantor OJK Purwokerto Farid Faletihan

### **3. Sinergi Program atau Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak**

Sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu supaya dalam program yang dilaksanakan lebih optimal dan menimbulkan citra yang baik. Saat ini OJK Purwokerto sudah melaksanakan berbagai

---

<sup>85</sup>BanyumsNews.com, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09 WIB.

program yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial diantaranya:

1. Melaksanakan Pasar Keuangan Rakyat, perhelatan yang bertajuk Pasar Keuangan Rakyat 2015: Menuju Indonesia Cerdas Keuangan itu diselenggarakan pada 9-10 Mei 2015 yang bertempat di Taman Rekreasi Andang Pangrenan Purwokerto. Pameran yang menjadi bagian strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI). Kegiatan ini diikuti oleh 30 LJK yang ada di Purwokerto.
2. Sosialisasi kepada Pondok Pesantren, yang dilaksanakan di pondok pesantren An Najah, Kutasari, kecamatan Baturaden, Banyumas, pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015, dengan tema Hati-hati Investasi Bodong, sosialisasi ini bertujuan agar para santri jangan mudah tergiur dengan bunga dan iming-iming keuntungan terlibat dari sebuah investasi.
3. Sosialisasi kepada mahasiswa/pelajar, yang dilakukan oleh OJK adalah dengan menggandeng salah satu fakultas ekonomi yaitu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersama dengan Bank Sinarmas dan PT Philip Securitas Indonesia pada hari Selasa, 20 September 2016 di Gedung Student Center IAIN Purwokerto. Acara sosialisasi tersebut diadakan untuk seluruh mahasiswa Febi mulai dari semester 1, 3,5 dan 7, dengan harapan seluruh mahasiswa Febi mengenal lebih jauh lembaga keuangan, khususnya yang berada di Purwokerto.

Kegiatan kerja sama atau kolaborasi tersebut yang di jalankan menjadikan OJK Purwokerto menjadi eksis di mata masyarakat dan dapat dikatakan optimal. Karena masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan ikut sosialisasi oleh OJK Purwokerto mereka jadi dapat lebih mengenal berbagai macam produk jasa keuangan yang ditawarkan dan pengetahuan akan literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangannya secara baik dan benar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan karyawan OJK Purwokerto menggunakan 3 pilar strategi OJK dalam Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia memiliki 3 pilar, dimana pilar dimaksud diuraikan dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif, ketiga pilar ini merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate* sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pilar 1 adalah dengan melaksanakan Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan

Dimana terdapat program strategisnya yaitu menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan dan melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang ditunjang dengan program inisiatif yaitu:

1). Dengan menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal.

- 2). Meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3). Serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 4). Meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.
- 5). Melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal.
- 6). Sosialisasi terhadap masyarakat umum berdasarkan profesi dan komunitas

b. Pilar ke 2 penguatan infrastruktur literasi keuangan

- 1). Menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya.
- 2). Menyusun program inisiatif yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pelaksanaan edukasi literasi keuangan.
- 3). Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan literasi keuangan, mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan.

c. Pilar ke 3 pengembangan produk dan jasa keuangan

- 1). Dengan program strategisnya mengembangkan dan memasarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang: perbankan, perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pasar Modal, Pegadaian.
- 2). Menyusun program inisiatif mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa keuangan yang terjangkau oleh masyarakat umum, menciptakan produk dan jasa keuangan yang bersifat *bundwing* guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan.
- 3). Memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan agar mudah diperoleh masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen.

2. Faktor pendukung yang dilakukan oleh OJK Purwokerto terkait dengan kegiatan literasi keuangan adalah sebagai berikut: 1.Sosialisasi dan Edukasi, 2.Seminar, 3.Lomba Cerdas Cermat, 4.Pasar Keuangan Rakyat, 5.Kuliah Umum, 6. *Press Confrence*, 7.JalanSehat, 8.Kunjungan, 9.Pasar Keuangan Syariah, 10.*Training of Trainers*, 11. Gerakan Inklusi Keuangan, 12. *Talkshow*, 13 *Focus Group Discussion* (FGD).

selain itu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat adalah Tingkat Pendidikan, Strata Sosial, Kelompok Usia.

## **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian di OJK Purwokerto tentang Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Penulis memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya proses edukasi terhadap konsumen lebih dapat diterima baik oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan program edukasi yang dilakukan oleh OJK Purwokerto sudah baik. Namun menurut pengamatan penulis, pelaksanaan program edukasi dan kampanye nasional perlu ditingkatkan lagi dari mulai program edukasi dan daerah jangkauan serta masyarakat sasaran edukasi sehingga pemahaman akan tingkat literasi keuangan dapat menyeluruh dan merata di segala aspek, dimana wilayah kerja OJK Purwokerto eks karisedenan banyumas sangat luas. Beberapa hal yang menjadi masukan dari penulis antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas edukasi konsumen terhadap masyarakat dan peningkatan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan.
2. Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan produk jasa keuangan dalam memberikan program terkait literasi keuangan dan dapat menyeluruh kesemua golongan masyarakat.
3. Perlu ditingkatkan kembali program – program edukasi dan kampanye nasional dengan aspek jangkauan masyarakat yang lebih menyeluruh



sehingga pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan lebih baik  
sehingga terwujud masyarakat yang *Well Literate*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 193.
- Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media. Hlm. 21.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Ed Revisi 2014, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 323.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Seri Literasi Keuangan OJK*, hlm, 3.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, hlm. 330.
- M. Faisal Abdullah, 2004, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang. Hlm. 16.
- Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 20.
- Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 57.
- Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91.
- Sudarwan Daim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 51.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 10.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2005), hlm. 269-270.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 8.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat. Hlm. 5.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21.

Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

## **NON BUKU**

Adib Gusta, *Literasi Keuangan Pada UMKM di pasar Koga Bandar Lampung*, (Bandar Lampung, 2016), hlm, 10.

BanyumsNews.com, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09 WIB.

Cintiya Meidia Tama, “Studi Financial Inclusion dan Financial Deepening di Indonesia,” 2015.

Edukasi Konsumen, Pdf. Maret 2015, diakses pada tanggal 28 Maret 2017, Pukul 21:30 WIB.

Frans Julians, *Analisis tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (Pekan Baru, Riau: Universitas Syarif Kasim Riau), hlm. 20.

<http://www.wiliamperkasa.com/2013/11/OJK-luncurkan-program-strategi-nasional-literasi-keuangan.html>., Sumber Inilah.com, Diakses Pada Tanggal 05 April 2017, Pukul 21:10.

Jurnal Skripsi, Bachtiar Hassan Mirza, *Membangun Keuangan Inklusif*, Guru Besar Fak. Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Krishna, Ayu; Rofaida, Rofi; Sari, Maya. 2010, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” [www.file.upi.edu](http://www.file.upi.edu) diunduh pada 18 April 2017. Pukul 18:20 WIB.

Lusardi, A & Mitchell, O.S. (2007) “Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth”. *Journal of Monetary Economics*, 54 (I), 205-224.

Majalah Integritas. *Majalah Internal*, Edisi 2015.

Majalah Bawor 2015, hlm. 12

Mochamad Zakki Zahariyan, *"Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Prilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga"* (Surabaya: Sekolah tinggi Ilmu ekonomi Perbanas Surabaya, 2016), hlm.15.

Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan," Direktorat Literasi dan Edukasi (2014), hlm 4.

RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan, BAB II, Pasal 2 dan 3.

SBY Resmikan Blueprint Literasi Keuangan," [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com) diunduh pada 20 November 2016.

Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/2016.

Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan di akses pada tanggal 24 Januari 2017 Pada Pukul 10:15 WIB.

Suara Merdeka Cetak, desember 15, 2016., *2018 Literasi Keuangan Capai 30%*, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Widyawati, Irin. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 1(1): hlm. 89-99.

Welly, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang*, ( Palembang: Universitas STIE Data Palembang, 2014), hlm. 18.

[www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) diakses Pada Tanggal 26 Maret 2017, Pukul 20:43.WIB

[www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id), Edukasi dan Perlindungan Konsumen,diakses Pada Tanggal 26 Maret 2017, Pukul 20:43 WIB